

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH INDUSTRI DAN PDRB  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2006 – 2011**

**Miftahol Arifin<sup>1</sup>  
Mohammad Rofik<sup>2</sup>  
Very andrianingsih<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen, FEB, Universitas Wiraraja  
miftaholarifin@gmail.com

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, FEB, Universitas Wiraraja  
mohammadrofik@gmail.com

<sup>3</sup>Program Studi Manajemen, FEB, Universitas Wiraraja  
veryandrianingsih@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research is a quantitative descriptive Revenue Regional Tax Sumenep under the title "Pengaruh Jumlah Penduduk, jumlah Industri dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2006 – 2011". The purpose of this study wants to know influence of the population, the total of large and medium industries, the amount of Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the Local Tax Revenue Sumenep Year 2006 to 2011. This study uses quartal time series data from 2006 to 2011. The method of analysis using linear regression analysis with the validity of the classical assumption, so the regression results can be validated at yield. The results using regression data by the following equation:  $Y = 5.08E09 - 23968.50X1 - 20595.21X2 + 2417.432X3 + 5889$ . Meaning X1 (Population) has a negative relationship with the local tax revenue Sumenep, X2 (Total of Large and Medium) has a negative relationship with the local tax revenue Sumenep and X3 Domsetik Gross Regional Product Number (GDP) has a positive relationship to the tax revenue Sumenep area. Simultaneously by using the t test and the X3 X2 X1 variables have a significant influence to Sumenep Revenue taxes. so testing Fstatistik partially by test also showed that the variables of population, the number of medium and large industries as well as Gross Regional Domestic Product (GRDP) a significant effect on local tax revenues Sumenep. It was proved by F-statistik value  $> F$  table,  $191.068 > 3.4668$  with  $\alpha$  of 5%. The conclusion of this study is a variable number of residents, the total of medium and large industries as well as Gross Regional Domestic Product (GRDP) a significant effect on local tax revenues Sumenep.*

**Keywords :** Revenue Regional Taxes, Population, The total of Industries, GRDP

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diberikan mandat oleh pemerintah pusat untuk

mengelola daerahnya secara otonom, tetapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Istilah ini sering disebut dengan desentralisasi.

Keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi pioner dalam implementasi otonomi daerah. Di mana, kedua UU tersebut sebagai regulasi pengganti atas UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi.

Amanah yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan daerah yang lebih luas, bertanggung jawab, dan nyata. Hal ini akan berdampak pada tugas fungsi dan peran pemerintah daerah senantiasa memiliki penghasilan yang cukup dan memiliki sumber pembiayaan yang memadai dalam rangka memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian diharapkan akan tercipta pengelolaan pemerintah daerah yang maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif, sehingga tujuan pembangunan daerah maupun nasional dapat tercapai.

Pendapatan asli daerah memiliki peran vital dalam menunjang sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional dan pembangunan daerah, baik berupa gaji pegawai, infrastuktur,

dan bentuk pelayanan publik lainnya. Banyak cara yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, diantaranya adalah pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain daerah yang sah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yang dihasilkan untuk menopang pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah daerah memberikan perhatian khusus supaya pajak daerah terus meningkat. Hal tersebut diperlukan mengingat pajak daerah merupakan tulang punggung bagi daerah untuk menyelenggarakan pekerjaan rumah tangganya.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura, melihat dari potensi fiskal Kabupaten Sumenep dengan jumlah penduduk 1.048.177 jiwa pada tahun 2011, Sumenep adalah Kabupaten yang cukup maju dari sektor ekonomi setelah Bangkalan di pulau Madura. Oleh sebab itu, dengan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sumenep bisa memaksimalkan pendapatan daerahnya termasuk dari sektor perpajakan, Berikut adalah tabel 1.1 yang menggambarkan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep tahun 2006 – 2011

**Tabel 1.1**  
 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Sumenep Tahun 2006 – 2011  
 ( dalam rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Pertumbuhan (%)
2006	4.354.243.000	
2007	5.138.477.062	18,01 %
2008	4.731.214.000	-7,92 %
2009	5.745.175.052	21,43 %
2010	7.136.069.604	24,20 %
2011	7.365.871.595	3,22 %

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep

Tabel 1.1 menggambarkan sebuah realisasi penerimaan pajak Kabupaten Sumenep tahun 2006 – 2011 ( dalam rupiah ), dimana dalam prosentasi realisasi tersebut mengalami fluktuasi seiring dengan realisasi penerimaan pajak Kabupaten Sumenep tahun 2006 – 2011. Itu artinya ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak Kabupaten Sumenep sehingga dalam tabel 1.1 mengalami fluktuasi.

**PEMBAHASAN**

Penerimaan pajak daerah merupakan instrumen penting yang bisa

berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan di daerah otonomi, bagaimana tidak, pajak merupakan salah satu sumber yang akan menjadi penyumbang suntikan dana terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan di gunakan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Sehingga perlu adanya optimalisasi pajak daerah itu sendiri, dalam hal ini perlu kemitraan yang berkesinambungan antara pemerintah daerah beserta masyarakat.

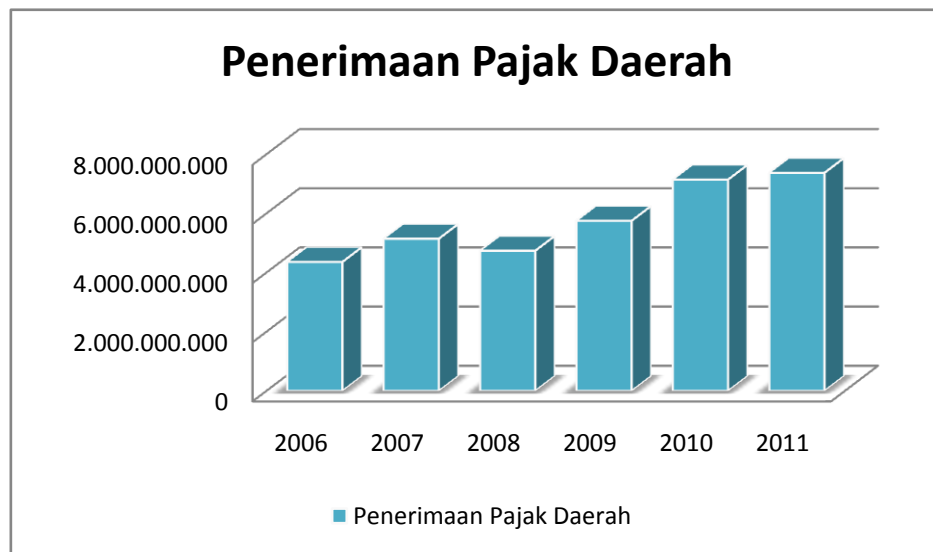
Berikut adalah data penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep tahun 2006 – 2011.

**Tabel 4.1**  
 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Sumenep Tahun 2006 – 2011

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)	Pertumbuhan (%)
2006	4.354.243.000	-
2007	5.138.477.062	18,01080146
2008	4.731.214.000	-7,925754209
2009	5.745.175.052	21,43130816
2010	7.136.069.604	24,20978542
2011	7.365.871.595	3,22028797

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep tahun 2006 – 2011

**Gambar 4.2**  
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 – 2011



Sumber : BPS Kabupaten Sumenep tahun 2006 – 2011

Dalam tabel 4.2 dapat di jelaskan bahwa prosentase penerimaan pajak daerah ada sebagian penerimaan pajak daerah yaitu pada tahun 2008 dan 2011 yang mengalami penurunan dalam prosentase namun dalam angka penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sehingga perlu di lakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor – faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah itu sendiri. Berikut adalah diagram penerimaan pajak tahun 2006 – 2011.

Dalam chart di atas dapat di simpulkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep setiap tahun bisa dikatakan selalu mengalami peningkatan, hanya pada 2008 yang mengalami penurunan penerimaan pajak daerah.

#### 1. Jumlah penduduk

Penduduk memiliki peran serta dalam mengoptimalkan segala bentuk kegiatan ekonomi di masyarakat, karena itu penduduk merupakan pelaku deri setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu penduduk sangat berperan dalam pembangunan terutama dala hal ini yang berkenaan dengan pajak daerah, jumlah penduduk sangatlah berperan aktif dalam menopang penerimaan pajak karena penduduk adala merupakan wajib pajak. Sehingga asumsi nya ketika jumlah penduduk meningkat juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Di bawah ini adalah data jumlah penduduk berikut pertambahan setiap tahunnya.

**Tabel 4.2**

Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2006 – 2011 (dalam jiwa)

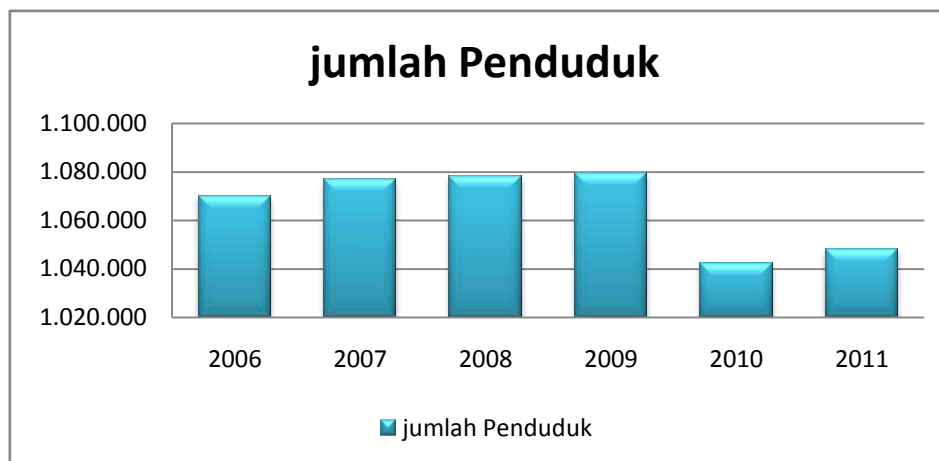
Tahun	Jumlah Penduduk	Laki - laki	Perempuan	Pertumbuhan (%)
2006	1.069.928	-	-	-
2007	1.076.592	518.391	558.201	0,623
2008	1.078.315	518.353	559.962	0,160
2009	1.079.322	516.131	563.191	0,093
2010	1.042.312	495.896	564.416	-3,429
2011	1.048.177	498.686	549.491	0,563

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep tahun 2006 – 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat di gambarkan dalam bentuk grafik seperti di bawah ini.

**Gambar 4.3**

Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2006 -2011



Sumber : BPS Kabupaten Sumenep tahun 2006 - 2011

Berdasarkan grafik di atas dapat di lihat bahwa jumlah penduduk mengalami pasang surut dalam penambahan setiap tahunnya, pada tahu 2009 adalah jumlah penduduk tertinggi sebesar 1.079.322 jiwa namun pada tahun terakhir yaitu pada tahun 2011 mengalami penyusutan dengan jumlah penduduk

sebesar 1.048.177, hal ini juga dapat memberikan dampak bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep.

Beberapa di anatar penyebab terjadinya penyusutan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut adalah banyak di temukannya beberapa kasus seperti penyakit demam

berdarah, Imamul Muttaqin, 2011 (Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Sumenep) menegaskan Pada Januari hingga Juli 2010 lalu ditemukan 587 kasus demam berdarah. Sementara Januari hingga awal Juli tahun ini baru ditemukan 62 kasus demam berdarah, Data di Dinkes Sumenep, 62 kasus demam berdarah yang terjadi pada Januari hingga awal Juli ini tersebar di 46 desa di 17 kecamatan. Pada Januari terjadi 15 kasus demam berdarah, Februari sebanyak 9 kasus, Maret sebanyak 15 kasus, April sebanyak 10 kasus, Mei sebanyak 7 kasus, Juni sebanyak 5 kasus, dan Juli untuk sementara 1 kasus. Dari 62 kasus demam berdarah yang terjadi tahun ini hingga awal Juli, dua penderitanya meninggal dunia, yakni berasal dari Kecamatan Kota dan Batang Batang.

Sementara pada 2010,

pada Januari ditemukan 146 kasus demam berdarah, Februari sebanyak 205 kasus, Maret sebanyak 119 kasus, April sebanyak 52 kasus, Mei sebanyak 40 kasus, Juni sebanyak 17 kasus, dan Juli sebanyak 8 kasus. Selain hal tersebut migrasi juga ikut berperan dalam penyusutan penduduk di Kabupaten Sumenep tahun 2010-2011, migrasi merupakan salah satu alternatif yang di pilih masyarakat tidak hanya di Kumenep bahkan se pulau Madura. Pada tahun 2010 tercatat dalam sesus penduduk Badan Pusat statistik 2010 yang berstatus migrasi ( seumur hidup ) tetap asal Sumenep sebesar 546.416 dengan rincian laki – laki sebesar 537.147 dan untuk jenis kelamin perempuan 9.269. itu adalah beberapa alasan mengapa jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep menurun pada tahun 2010.

**Tabel 4.3**

Jumlah Industri Besar dan Sedang Kab. Sumenep Tahun 2006 – 2011

Tahun	Jumlah Industri Besar dan Sedang
2006	32
2007	31
2008	41
2009	40
2010	40
2011	68

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep Tahun 2006 – 2011

2. Jumlah industri besar dan sedang

Jumlah industri besar dan sedang adalah jumlah bidang mata pencaharian yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan sehari - sehari yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Sehingga dalam hal ini industri memiliki peran sebagai pengelola bahan – bahan baku yang di hasilkan dari sektor – sektor ekonomi guna memberikan added value terhadap bahan baku tersebut.

Kabupaten Sumenep memiliki beberapa industri yang merupakan sumber dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep yaitu industri besar dan sedang yang mempunyai potensi pajak yang dominan dalam penerimaan

pajak daerah Kabupaten Sumenep. Berikut adalah data jumlah industri besar dan sedang Kabupaten Sumenep tahun 2006 – 2011.

Berdasarkan tabel di Atas dapat di lihat bahwa pada tahun terakhir yaitu tahun 2011 ada kenaikan jumlah industri besar dan sedang yang sangat signifikan di banding tahun – tahun sebelumnya yaitu dari 40 tahun 2010 dan 68 di tahun 2011. Sehingga Kabupaten sumenep memiliki potensi yang di lihat dari sektor perindustrian karena dari tahun ke tahun industri di Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan.

3. Jumlah PDRB Kabupaten Sumenep

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dipengaruhi, salah satunya adalah infrastruktur ekonomi. Nilai pertambahan hasil dari Produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep juga memiliki peran serta dalam meningkatkan penerimaan pajak

daerah Kabupaten Sumenep karena pertambahan nilai dari produk tersebut adalah pajak tidak langsung yang masuk terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep. Sehingga Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) perlu di jadikan bahan untuk di perhatikan dan di eksplorasi agar dapat menghasilkan produk barang atau pun jasa yang bisa bermanfaat bagi masyarakat paa umumnya.

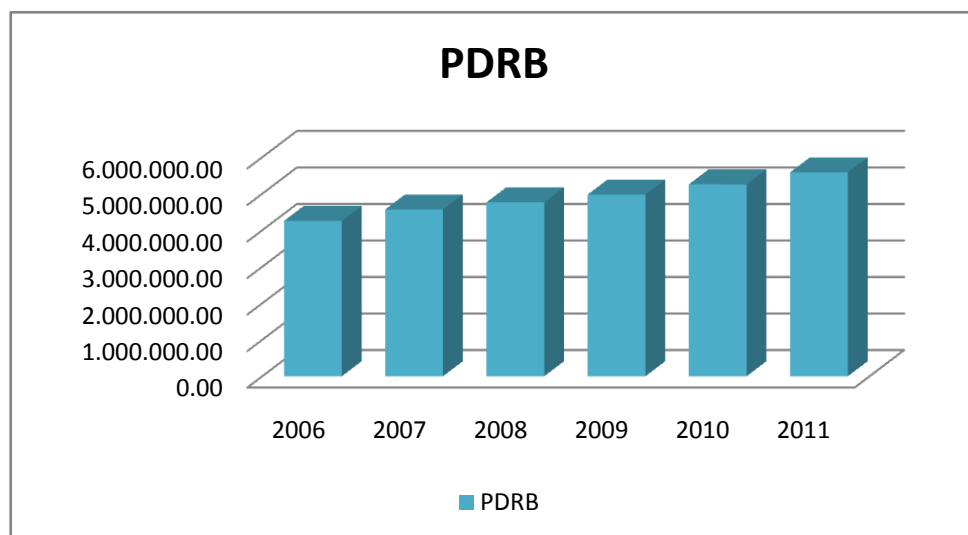
Berikut adalah tabel perkembangan Jumlah total produk domestic regional bruto ( PDRB ) Kabupten Seumenep tahun 2006- 2011 :

**Tabel 4.4**  
 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumenep  
 Atas Dasar Harga Konstant tahun 2006-2011  
 (Dalam Juta)

Tahun	PDRB	Pertumbuhan PDRB %
2006	4.255.989,04	-
2007	4.567.101,08	7,31
2008	4.763.580,59	4,30
2009	4.975.225,01	4,44
2010	5.255.875,27	5,64
2011	5.584.051,23	6,24

Sumber : BPS Kabupten Sumenep tahun 2006 - 2011

**Gambar 4.5**  
 Grafik Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kabupaten Sumenep  
 Tahun 2006 - 2011



Sumber : BPS Kabupaten Sumenep tahun 2006 - 2011



Berdasarkan grafik di atas dapat di simpulkan bahwa produk domestic regional bruto (PDRB) Kabupaten sumenep setiap tahun mengalami penigkatan. Pada tahun terkhir tercatat sebesar 5.584.051,23 yaitu pada tahun 2011 naik sebesar 6 %.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, B., 2000, Perpajakan Indonesia (Teori Perpajakan, Kebijakan Perpajakan Pajak Luar Negeri), Diadit Media, Jakarta
- Bohari, H., 2002, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung
- Djojodirdjo, M.A Moegni, 1979, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Indonesia.
- Pustaka LP3ES
- Erly, Suandy, 2001, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi, 1999, Akuntansi Pajak, Grasindo, Jakarta.
- Gunadi, 2001, Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya, Salemba Empat, Jakarta.
- Hadi, H. Moeljo, 2001, Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Sita Pusat dan Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamdan, Aini, 1993, Perpajakan, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta
- Insukindro, 1994. Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Laporan Penelitian Keuangan Daerah, FE-UGM Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga, Jakarta.
- Machfoedz, Mas'ud, 1999, Akuntansi Keuangan Menengah, Buku 2, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2002), Andi, Yogyakarta
- Nasution. 2003. Metode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sefudin, 2008. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Utara, Thesis Pascasarjana Magister Ekonomi Pembangunan USU. Medan
- Syakur, Syafi'i, Ahmad, 2009, Intermediate Accounting , AV Publisher, Jakarta.
- Todaro, Michael p. 2004. Pembangunan ekonomi Dunia Ke-III Jilid 3. Erlangga, Surabaya
- Peraturan Perundang-undangan:
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2009, Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk tujuan perpajakan tanggal 23 Februari 2009.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK.03/2008 Tanggal 23 Mei 2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
- Surat Dirjen Pajak No. S-185/PJ.42/2003 Tanggal 7 April 2003 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Kompensasi Kerugian Fiskal Setelah Dilakukan Kuasi Reorganisasi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).